FORUM PERANGKAT DAERAH KOTA BONTANG

TAHUN 2019

Bontang, 21 Maret 2019

PENYUSUNAN RKPD 2020

RPJPD 2005-2024

2005-2009
Pondasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bontang pada masa depan.

2010-2014
Tahapan Pengembangan untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Bontang jangka panjang

2015-2019
Tahapan Penguatan
Pemantapan capaian hasil tahapan pembangunan sebelumnya

2019-2024
Tahapan pemantapan memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota Bontang

RPJMD 2016-2021

2017	2018	2019	2020	2021
Penguatan daya dukung infrastruktur dalam pengembangan daya saing ekonomi daerah	Penguatan SDM Industri berbasis industri maritim dan industri unggulan daerah	Pemantapan daya saing SDM dan sektor-sektor unggulan daerah	Meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi maritim dalam perekonomian daerah	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan

VISI

Mengutkan Kota Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021

MISI

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melaluipeningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Kualitas Sumber Daya Manusia

- Belum Mantapnya Daya Saing SDM khususnya terkait dengan daya saing angkatan kerjayang berimplikasi terhadap relatif tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 12,44 % pada tahun 2017 .
- Masih terbatasnya program-program pelatihan tenaga kerja.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Peningkatan tekanan terhadap kelestarian lingkungan hidup baik akibat pertumbuhan sektor industri maupun pertumbuhan penduduk.
- Semakin meningkatnya penggunaan lahan, air bersih, produksi limbah dan produksi emisi.
- Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya air bawah tanah.
- Semakin terbatasnya potensi peningkatan Ruang Terbuka Hijau
- Penataan DAS dan ancaman bencana Banjir.

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Daerah

- Pertumbuhan ekonomi masih sangat tergantung pada peran sektor industri basis.
- Investasi masing sangat didominasi pada sektor industri padat modal sehingga serapan tenaga kerjanya relatif sangat terbatas
- Produktivitas dan daya saing sektor perikanan belum mencapai skala ekonomi bagi tumbuhnya investasi industri pengolahan perikanan.
- Dukungan pembangunan infrastruktur perhubungan dan infrastruktur ekonomi masih relatif terbatas.

KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2020

Tema RKP 2019	RKPD Prov Kaltim 2020	RKPD Kota Bontang 2020
"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"	"Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan InfrastrukturWilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi"	"Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Maritim dalam Perekonomian Daerah"
1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	• Pemerataan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan • Pengembangan Pendidikan Vokasi Dan Kejuruan Berbasis Teknologi • Peningkatan Tata Kelola Dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua 2. Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas 3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan 4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman 5. Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
2 Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Pemerataan Dan Peningkatan Konektivitas Pusat-pusat Produksi	6. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Penguatan Peran Dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan	7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Non Migas 8. Peningkatan Daya Saing Ekonomi
4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,dan Sumber Daya Air	Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 10. Peningkatan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang 11. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan air bersih
5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		12. Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah

KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

No	Uraian	Penetapan APBD 2019	Proyeksi RKPD 2020	Persentase
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**	**1.351.230.694.044**	**1.522.090.350.000**	**12,64**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**169.735.860.000**	**182.696.600.000**	**7,64**
1.1.1.	Pajak Daerah	96.060.000.000	110.881.600.000	15,43
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.103.700.000	4.700.000.000	14,53
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.835.000.000	6.255.000.000	7,20
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	63.737.160.000	60.860.000.000	- 4,51
1.2.	**Dana Perimbangan**	**958.564.302.000**	**1.096.743.750.000**	**14,42**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	654.599.486.000	776.743.750.000	18,66
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	233.360.408.000	245.000.000.000	4,99
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	70.604.408.000	75.000.000.000	6,23
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**222.930.532.044**	**242.650.000.000**	**8,85**
1.3.1	Hibah	13.886.200.000	15.000.000.000	8,02
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	165.571.050.044	180.650.000.000	9,11
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31.973.282.000	25.000.000.000	- 21,81
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000	20.000.000.000	100,00
1.3.6	Penerimaan Lain-Lain	1.500.000.000	2.000.000.000	33,33
5	**BELANJA DAERAH**	**1.178.258.783.454**	**1.622.090.350.000**	**37,67**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**467.155.185.568**	**499.500.000.000**	**6,92**
5.1.1	Belanja Pegawai	440.895.695.068	460.000.000.000	4,33
5.1.4	Belanja Hibah	16.428.390.500	30.000.000.000	82,61
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000	1.500.000.000	7,14
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	5.931.100.000	6.000.000.000	1,16
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.000.000.000	- 20,00
5.2	**Belanja Langsung**	**984.075.508.476**	**1.112.590.350.000**	**13,57**
5.2.1	Belanja Pegawai	37.582.108.139	37.590.350.000	0,02
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.712.254.268	520.000.000.000	1,62
5.2.3	Belanja Modal	434.781.146.069	565.000.000.000	28,80

KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

Pendapatan Asli Daerah
182,696 M

Dana Perimbangan
1.096,743 M

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
242,650 M

Penerimaan Pembiayaan SiLPA : 100 M

DEFISIT
100 M

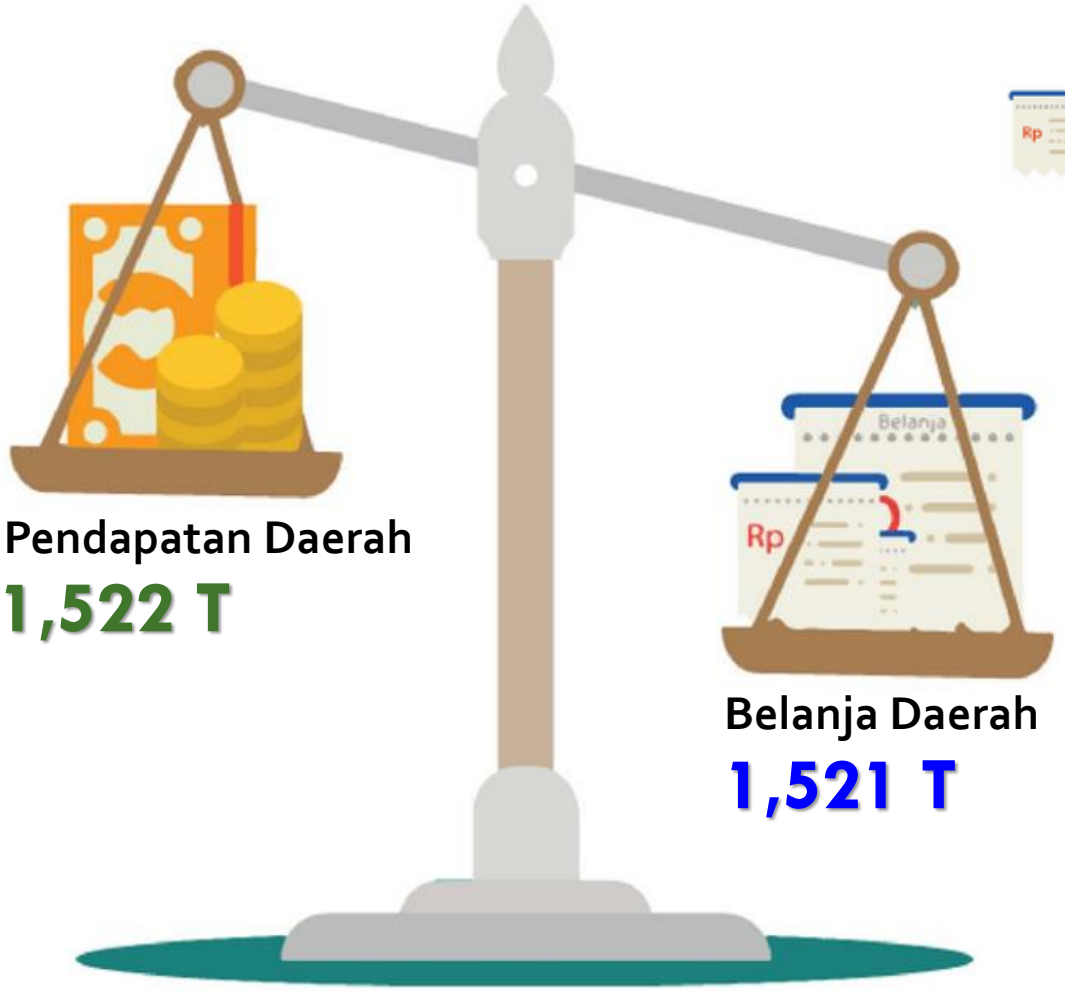

Pendapatan Daerah
1,522 T

Belanja Daerah
1,521 T

Belanja Tidak Langsung
499,500 M

Uraian	Pagu
B. Pegawai	460 M
B. Hibah	30 M
B. Bansos	1,5 M
B. Bankeu	6 M
B. Tak Terduga	2 M

Belanja Langsung
1.117, 590 M

Uraian	Pagu
B. Pegawai	37,59 M
B. Barang & Jasa	520,00 M
B. Modal	560,00 M

Sumber: Bapelitbang 2019

SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR 2020

HASIL EVALUASI

Capaian angka kemiskinan belum mencapai target (Realisasi 2018 : 4,62 Target : 4,67)
Pengangguran belum mencapai target (Realisasi 2017 : 11,98 Target : 10,14)

ISU STRATEGIS

Angka Kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Menurunkan pengangguran dan kemiskinan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
- Peningkatan Kesempatan Kerja
- Penataan Permukiman Lingkungan
- Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Wajib Belajar Sembilan Tahun

PD

- DSPM
- DISNAKER
- DPKPP
- DINKES
- DISDIK

SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR 2020

HASIL EVALUASI

Masih terdapat kawasan permukiman yang belum bebas banjir (Realiasi 2018 : 29,19 Ha Target : 28,83 Ha)

ISU STRATEGIS

Infrastruktur penanggulangan banjir belum optimal

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Program Pengendalian Banjir
- Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman
- Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

PD

- DPUPR
- DPKPP
- DLH

SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR 2020

HASIL EVALUASI

Belum optimalnya pengembangan wisata pesisir dan laut

ISU STRATEGIS

Kontribusi sektor maritime dalam perekonomian daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Program Pengambangan Pariwisata	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Program Rahabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
PD	DISPOPAR	DISKOMINFO	DKUKMP	SATPOLPP	BPBD	DPUPR	DLH
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya					Program Peningkatan Palayanan Angkutan	
PD	DISDIK					DPUPR	

KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS TAHUN 2020

Smart Green Creative CITY

SDM & PEMERINTAHAN

- Pakaian Seragam Sekolah
- Pembangunan RSUD dan RS Tipe D
- Penyelesaian Pembangunan Kantor Pemerintahan
- Produta
- Pengadaan Lahan Untuk Sarana Publik
- Penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah

EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

- Pengembangan Pariwisata
- Pengurukan Pelabuhan Loktuan
- Pembangunan Pasar Rawa Indah
- Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

LINGKUNGAN HIDUP

- Pemantapan Infrastruktur Kawasan Permukiman
- Penataan Taman Median Jalan
- Penanganan Banjir
- Pengelolaan Kebersihan/Persampahan
- Pengadaan Lahan RTH

PELAKSANAAN SPM

Pelaksanaan SPM pada 6 urusan wajib pelayanan dasar (PP No. 2 Tahun 2018) :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN 2019

USULAN BERDASARKAN BID.PEMBANGUNAN

KECAMATAN	EKONOMI	PEMERINTAHAN & APARATUR	PRASARANA & SARANA WIL.	SOSIAL & BUDAYA	JUML.
Bontang Barat	3	3	82	11	99
Bontang Selatan	8	11	125	6	150
Bontang Utara	7	4	128	11	150
JUMLAH	18	18	335	28	399

PERSENTASE USULAN BERDASARKAN BID.PEMBANGUNAN

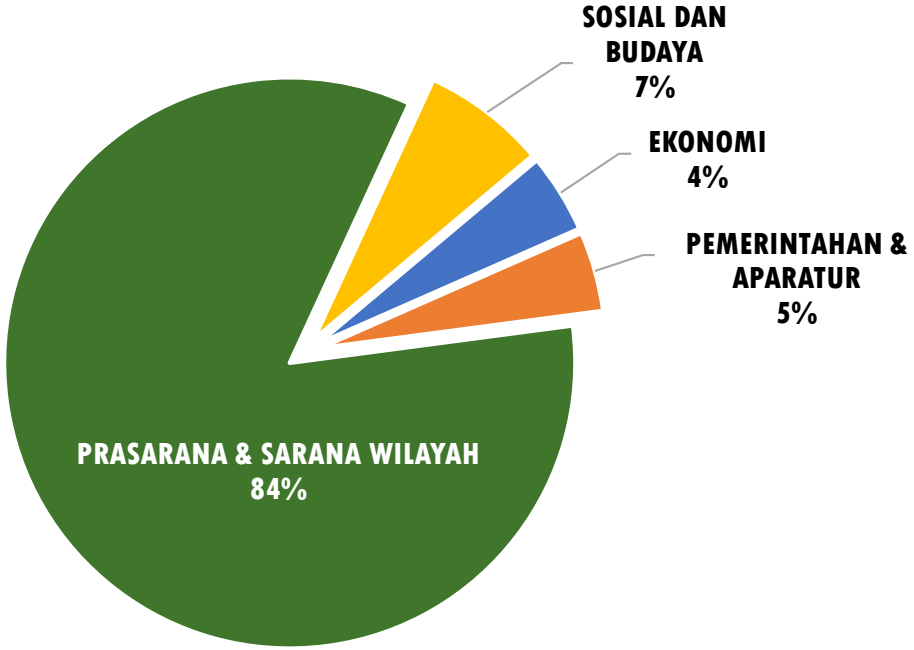

USULAN BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

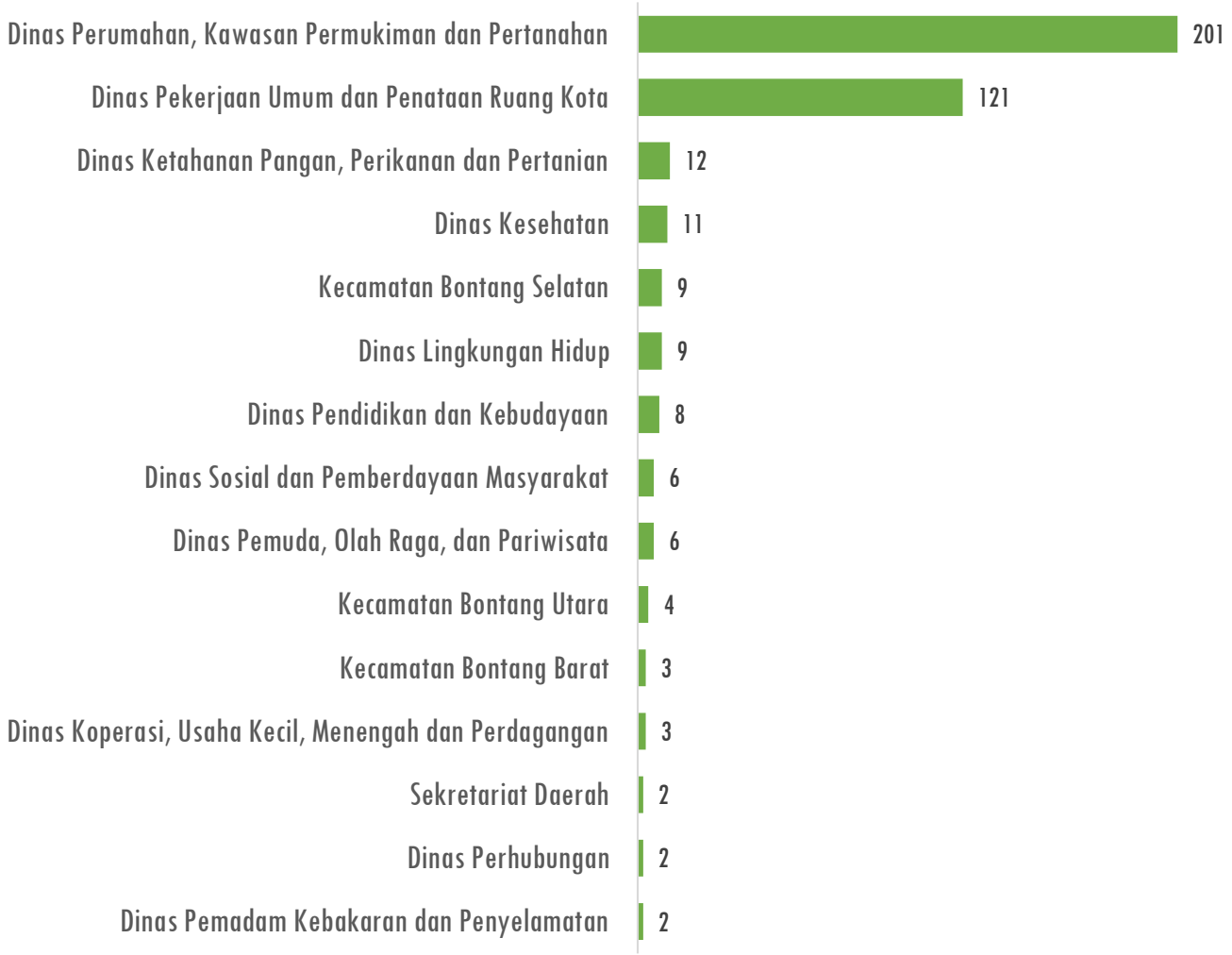

TUJUAN PELAKSANAAN FORUM PD

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah

HASIL :

1. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
2. Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah

TERIMA KASIH